



MENGURAI FAKTA, BUKAN FITNAH, FILM DIRTY VOTE MEMBUKA MATA

Sumber Foto: <https://www.suara.com/news/2024/02/11/193939/film-dirty-vote-dituding-fitnah-alissa-wahid-pasang-badan-percaya>

Pada 11 Februari 2024, masyarakat Indonesia ramai memperbincangkan film dokumenter yang di dalamnya melibatkan tiga orang Akademisi Ahli Hukum Tata Negara ternama yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Fery Amsari. Tiga Ahli Tata Negara tersebut menjelaskan adanya berbagai kecurangan pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang telah terjadi di Indonesia. Kecurangan-kecurangan tahap penyelenggaraan pemilu dalam film Dirty Vote mereka didasarkan dari berbagai referensi terbuka, diantaranya adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dari rekaman audio, dan dari berbagai pemberitaan media massa berbentuk tulisan dan video sebagai produk jurnalistik. Hal itu kemudian dianalisis oleh tiga orang Akademisi Ahli Hukum Tata Negara menggunakan ilmu pengetahuan/keahlian masing-masing, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, termasuk peraturan perundang-undangan hingga menyimpulkan penilaian bahwa telah terjadi kecurangan selama proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Dokumen putusan lembaga negara, foto dan/atau video produk jurnalistik, rekaman video, telah menjadi suatu fakta. Dalam ilmu hukum, "fakta peristiwa" itu tidak memihak. Memang akan selalu ada pihak yang dirugikan oleh fakta, namun itu adalah konsekuensi dari fakta, bukan keberpihakan suatu fakta. Jika memperhatikan film dokumenter Dirty Vote, memang banyak mengulas berbagai dugaan kecurangan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dari kelompok Tim Kampanye Nasional ("TKN") 02 Prabowo-Gibran, namun tidak

secara mutatis mutandis bahwa Film Dirty Vote memihak kepada pasangan calon presiden lainnya yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Berjarak sekitar 2 jam pasca rilis Film Dokumenter Dirty Vote, TKN 02 Prabowo-Gibran langsung menanggapi film dokumenter Dirty Vote, dimana salah satu tanggapannya adalah pada intinya menyatakan bahwa Dirty Vote bernada fitnah, pembuat Dirty Vote adalah orang yang tidak suka melihat elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket tembus batas psikologis satu putaran 50% plus 1 suara. Jika tidak suka seharusnya mendukung calon lain sesuai koridor elektoral.

Sekalipun TKN 02 Prabowo-Gibran menjadi pihak yang terkait dalam dugaan kecurangan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dalam film Dirty Vote, pasangan calon Presiden Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud secara tidak langsung mendapat keuntungan elektoral atas terbitnya film Dirty Vote, namun bukan berarti bahwa film Dirty Vote ditujukan untuk menyerang TKN 02 Prabowo-Gibran dan memihak kepada pasangan calon Presiden Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Itu hanyalah konsekuensi dari fakta peristiwa yang harus diterima, bukan keberpihakan fakta.

Perbuatan tiga orang akademisi Ahli Hukum Tata Negara dalam Dirty Vote tidak dapat dikualifikasikan sebagai fitnah sebagaimana diatur

dalam Pasal 27A Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024, karena berdasarkan UU ITE, SKB ITE Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa bukan suatu pencemaran nama baik dan/atau fitnah jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, atau kedudukan suatu jabatan. Dalam film Dirty Vote, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Fery Amsari hanya menguraikan fakta-fakta, lalu melakukan analisis/penilaian terhadap fakta peristiwa yang telah terjadi. Perbuatan tersebut adalah merupakan kepentingan publik (*public interest*) karena materi yang dibahas dalam film Dirty Vote adalah berkaitan dengan keselamatan hukum dan demokrasi Indonesia.

Menurut penilaian Penulis, film dokumenter Dirty Vote adalah pendidikan demokrasi, karena menggambarkan betapa buruknya kondisi hukum dan demokrasi kita saat ini. Pro-kontra terhadap film Dirty Vote pasti ada, namun masyarakat tetap harus menghargai hasil karya tersebut karena telah menambah referensi ilmu pengetahuan dalam memilih calon presiden pada 14 Februari 2024. Film Dirty Vote tidak pernah menyatakan atau mengajak publik supaya tidak memilih calon presiden tertentu. Film Dirty Vote secara tidak langsung mengajak publik supaya menyelamatkan hukum dan demokrasi Indonesia.



Penulis:

M. Al Ayyubi Harahap, S.H.

Advocate

P. (+62-21) 813 8576 3746

E. ayyubi.harahap@harisazhar.co.id

info@harisazhar.co.id

W. harisazhar.co.id